

Penguatan Kelembagaan LKD Berbasis Participatory Governance untuk Mendukung Tata Kelola Desa Berkelanjutan di Bandur Picak Kabupaten Kampar

Rahyunir Rauf¹, Sri Maulidiah², Nina Yuslaini³, Fitriisia Munir⁴, Ema Fitri Lubis⁵, Khairul Rahman⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email Korespondensi: rahyunir.ip@soc.uir.ac.id

Email: srimaulidiah@soc.uir.ac.id, ninayuslaini@soc.uir.ac.id,

fitrisiamunir@soc.uir.ac.id, emafitrilubis@soc.uir.ac.id, khairul.ip@soc.uir.ac.id

Abstract

Community Service (PKM) activities in Bandur Picak Village, Kampar Regency were carried out as an effort to address partner issues, namely the limited capacity of Village Community Institutions (LKD) in understanding their roles, functions, and positions as partners of the village government in village governance. The solution offered by the PKM team is capacity building through a series of structured activity stages including; socialization surveys, counseling, monitoring and evaluation, and program sustainability planning. The methods used in the activities are; Rapid Rural Appraisal (RRA) Method, Participatory Rural Appraisal (PRA) Method, Action Research (AR) Method. The results of the activities showed an increase in the capacity of LKD members by 72% based on the results of pre-test and post-test evaluations, especially in the aspects of understanding institutional functions, organizational governance, and participation in village development. In addition, the level of community involvement in village deliberation forums increased from 55% to 84% after the program implementation. This activity also succeeded in building a collaborative commitment between the village government and LKD in preparing a more participatory and transparent village development program. These findings demonstrate that a participatory and collaborative institutional strengthening model can enhance the professionalism of LKDs as strategic partners of village governments while simultaneously strengthening inclusive, transparent, and sustainable village governance. Thus, this PKM activity not only provides practical impacts for village communities but also contributes to the development of a participatory governance-based village institutional empowerment model.

Keywords: *Capacity_Building, LKD, Village_Government, Government_Partners, Governance*

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar dilaksanakan sebagai upaya untuk menjawab permasalahan mitra, yaitu keterbatasan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam memahami peran, fungsi, dan kedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Solusi yang ditawarkan tim PKM adalah penguatan kapasitas melalui serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur meliputi ; survei sosialisasi, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, serta perencanaan keberlanjutan program. Metode yang digunakan dalam

kegiatan yaitu; Metode Rapid Rural Appraisal (RRA), Metode Participatory Rural Appraisal (PRA), Metode Action Research (AR). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas anggota LKD sebesar 72% berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, terutama pada aspek pemahaman fungsi kelembagaan, tata kelola organisasi, dan partisipasi dalam pembangunan desa. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa meningkat dari 55% menjadi 84% setelah pelaksanaan program. Kegiatan ini juga berhasil membangun komitmen kolaboratif antara pemerintah desa dan LKD dalam penyusunan program pembangunan desa yang lebih partisipatif dan transparan. Temuan ini menunjukkan bahwa model penguatan kelembagaan berbasis partisipatif dan kolaboratif mampu meningkatkan profesionalitas LKD sebagai mitra strategis pemerintah desa sekaligus memperkuat tata kelola desa yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan dampak praktis bagi masyarakat desa, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan model pemberdayaan kelembagaan desa berbasis participatory governance.

Kata Kunci: *Penguatan Kapasitas, Pemerintah Desa, Mitra Pemerintah, Tata Kelola*

Pendahuluan

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu mandat utama pemerintah yang bersifat kompleks dan multidimensional (Eriksen, 2020; Ojiako et al., 2024). Kompleksitas ini muncul karena jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, dinamika sosial yang semakin beragam, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi (Andrews et al., 2020; Pangbourne et al., 2020). Di sisi lain, keterbatasan jumlah aparatur pemerintah menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan pelayanan dan kapasitas penyelenggara (Kabadayi et al., 2020; Remillard et al., 2022). Dalam konteks ini, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) hadir sebagai mitra strategis pemerintah desa untuk menjembatani keterbatasan tersebut (Maulidiah et al., 2023).

Secara konseptual, pemerintah dapat dipahami sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam memproses pelayanan publik dan berkewajiban memenuhi hak sipil warga negara (Chapman, 2024; Rosenbloom et al., 2022). Pemerintahan desa sendiri merupakan sistem multiproses yang bertujuan melindungi, memberdayakan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat local (Ng & Wong, 2022; Seva et al., 2025). LKD dibentuk atas prakarsa masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan, sehingga keberadaannya identik dengan struktur pemerintahan terendah (Hao, 2023). Dalam perspektif governance, LKD termasuk dalam domain civil society yang menegaskan peran masyarakat madani dalam tata kelola pemerintahan desa (Rauf et al., 2024).

Kebaruan (novelty) kegiatan ini terletak pada penerapan model penguatan kelembagaan LKD berbasis participatory governance yang mengintegrasikan pendekatan capacity building, kolaborasi multipihak, dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Berbeda dengan program penguatan kelembagaan sebelumnya yang cenderung bersifat administratif, kegiatan ini menempatkan LKD sebagai aktor strategis dalam membangun tata kelola desa kolaboratif melalui peningkatan kapasitas organisasi, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan jejaring kemitraan antara pemerintah desa, masyarakat, dan perguruan tinggi. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak praktis terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan desa, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model tata kelola pemerintahan desa berbasis partisipatif dan berkelanjutan.

Hakikat pembentukan LKD adalah sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Penataan LKD diatur dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018, yang menjelaskan jenis, tugas, dan fungsi lembaga kemasyarakatan, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPM. Tugas utama LKD meliputi pemberdayaan masyarakat, partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik (Nor et al., 2022; Pedersen et al., 2022). Fungsi LKD mencakup penyaluran aspirasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga, pengembangan sumber daya manusia, serta mediasi konflik sosial di tingkat lokal. Dengan demikian, LKD tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap aparatur desa, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan (Afnan et al., 2025; Humaedi et al., 2025).

Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, dan memiliki enam lembaga kemasyarakatan desa (LKD), dapat dilihat tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, RT/RW, dan LKD Desa Bandur Picak, Kampar

No.	Kategori	Keterangan
1.	Jumlah Penduduk	± 2.350 jiwa
2.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	± 550 KK
3.	Jumlah RT	9 RT
4.	Jumlah RW	3 RW
5.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	6 LKD (terdiri dari: PKK, Karang Taruna, LPM, Posyandu, BPD, dan Linmas)

Pada kenyataannya secara umum kedudukan LKD di desa Bandur Pijak masih lemah, perlu adanya upaya penguatan LKD oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi bersama perangkat desa, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah:

1. Lembaga di Desa Bandur Picak Belum memiliki program kerja tahunan yang terstruktur.
2. Rendahnya kapasitas LKD di Di Desa Bandar Picak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. Kurangnya sinergi antara LKD Bandur Picak dengan pemerintah desa.
4. Minimnya keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di Desa Bandur Picak
5. Keterbatasan pemanfaatan teknologi dan informasi oleh LKD Bandur Picak.

Target yang ditetapkan dalam kegiatan penyuluhan pengabdian masyarakat ini yaitu bagaimana kegiatan yang dilakukan membawa dampak positif sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan solusi yang dilakukan, dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Alir Antara Permasalahan, Solusi, dan Target PKM
 Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Tujuan kegiatan PKM

No.	Tujuan	Keterangan
1.	Memperjelas kedudukan LKD dalam system pemerintahan Desa	Memberikan kejelasan dan pemahaman kedudukan LKD dalam system pemerintahan desa dalam bentuk struktur Organisasi
2.	Meningkatkan Pemahaman Peran dan Fungsi LKD	Memberikan pemahaman tentang tugas pokok, fungsi, dan peran strategis LKD dalam pembangunan desa
3.	Menguatkan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatkan kemampuan dalam Perencanaan, pelaksanaan program, administrasi, dan manajemen LKD.
4.	Mendorong Sinergi antara LKD dan Pemerintah Desa	Membentuk hubungan kerja yang harmonis, komunikatif, dan kolaboratif untuk pembangunan desa yang partisipatif
5.	Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat	Meningkatkan pemahaman pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa

Selain tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, selajutnnya diharapkan memberikan manfaat secara signifikan kepada LKD, pemerintah desa maupun masyarakat, adapun manfaat kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan yaitu:

1. Manfaat bagi pemerintah desa yaitu membantu pemerintah desa dalam perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa Bandur Picak.

2. Manfaat bagi Masyarakat yaitu masyarakat menjadi memahami arti penting keberadaan Lembaga kemasyarakatan dalam membantu pemenuhan pelayanan kemasyarakatan Bandur Picak.
3. Manfaat bagi akademik yaitu praktik dalam kegiatan pengabdian dapat diintegrasikan kedalam materi bahan ajar.

Kegiatan PKM ini dilakukan dalam upaya realisasi perencanaan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat perguruan tinggi sehingga kegiatan PKM yang dilakukan relevan dengan Renstra DPPM UIR 2021-2025 yang berfokus pada SDGs terkait Tema Sosial Humaniora bidang Ekonomi dan Sumberdaya Manusia dapat dilihat pada gambar 2. berikut.



Gambar 2. Renstra PKM UIR 2021-2025

Berdasarkan permasalahan, tujuan, dan manfaat serta renstra perguruan tinggi maka perlu dilakukan kegiatan PKM yang bersifat kemitraan dengan tema Penguatan Kapasitas LKD dalam Keberlanjutan Pembangunan Desa di Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu.

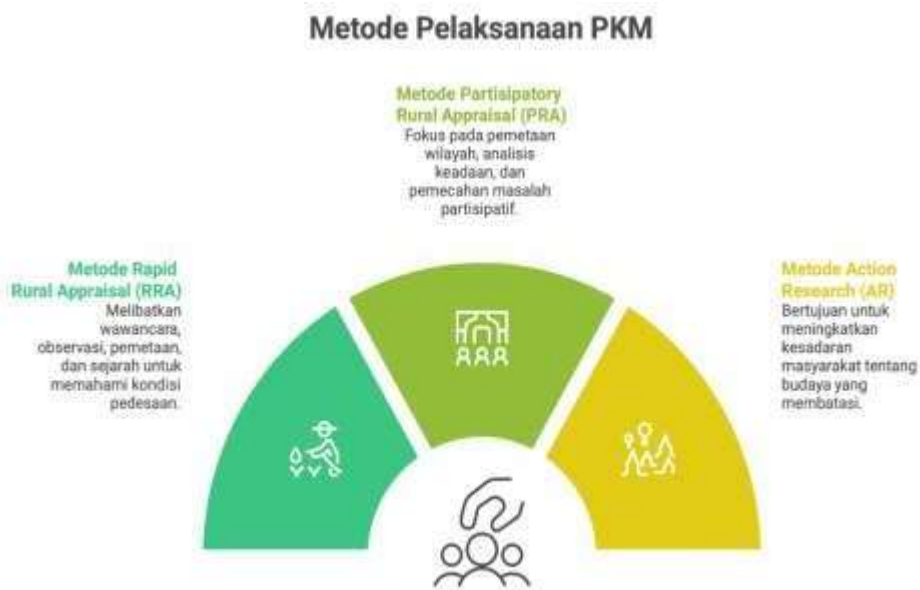
Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang diintegrasikan dengan konsep capacity building dan participatory governance dalam rangka memperkuat kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai mitra strategis pemerintah desa. Pendekatan PAR dipilih karena mampu mengombinasikan proses partisipatif masyarakat dengan tindakan nyata yang berorientasi pada pemecahan masalah kelembagaan secara berkelanjutan. Secara konseptual, pendekatan ini menempatkan LKD dan masyarakat desa tidak hanya sebagai objek kegiatan, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, implementasi program, hingga evaluasi kegiatan.

Kegiatan PKM dilaksanakan di Desa Bandur Picak, Kabupaten Kampar, dengan melibatkan 35 partisipan yang terdiri atas pengurus LKD, perangkat desa,

tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelembagaan dan pembangunan desa. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan kapasitas organisasi LKD, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis kolaboratif.

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas lima tahap utama. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan pemetaan kebutuhan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan Focus Group Discussion (FGD). Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala kelembagMetode pelaksanaan dalam kegiatan PKM ini adalah cara atau teknik yang digunakan untuk melakukan kegiatan PKM sehingga teknik tersebut dianggap dapat memecahkan masalah yang dihadapi BPD dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Metode Kegiatan PKM

Tahapan pelaksanaan dalam kegiatan PKM ini terdiri dari beberapa tahapan, divisualisasikan pada gambar 4. Berikut.



Gambar 4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM

1. Tahapan Survei, Tahap ini melakukan kunjungan awal pemerintah desa bandur Picak dengan tujuan ingin mengetahui permasalahan mitra sehingga bisa disesuaikan dengan bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh tim PKM.
2. Tahapan Sosialisasi, setelah melakukan survei awal dan mengetahui masalah mitra maka tim PKM melakukan diskusi terkait kegiatan yang akan dilakukan agar dapat memberikan solusi kepada mitra. Selanjutnya melakukan sosialisasi kepada mitra Pemerintah Desa Bandur Picak untuk menjelaskan bentuk kegiatan yang akan dilakukan, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, dan solusi yang direkomendasikan.
3. Tahapan Penyuluhan, tahapan ini tim PKM yang terdiri dari dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan inti yaitu penyampaian materi terkait dengan (1) Keberadaan Pemerintah Desa dalam Sistem NKRI, (2) Kebijakan Pemerintahan Desa, (3) Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Tahapan Penyusunan Laporan, tahapan ini tim PKM akan membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk dokumen laporan kegiatan PKM dan membuat luaran hasil kegiatan yang telah ditargetkan yaitu menulis artikel publikasi pada jurnal PKM, menulis artikel publikasi pada media massa elektronik.
5. Tahapan Monitoring dan Evaluasi, tahapan ini melakukan pengukuran terhadap kegiatan yang dilakukan dengan melihat sejauh mana kemanfaatan kegiatan PKM yang dilakukan bagi mitra Pemerintah Desa Bandur Picak.
6. Tahap Keberlanjutan Program, tahapan ini melihat sejauh mana keberhasilan program PKM dalam rangka meningkatkan Profesionalitas LKD di Desa Bandur Picak.

Kegiatan PKM yang dilaksanakan terdapat beberapa partisipasi mitra untuk mendukung keberhasilan kegiatan, divisualisasikan pada gambar 5 berikut.



Gambar 5. Partisipasi Mitra Pemerintah Desa dan LKD Bandur Picak, Kampar

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan pada 10 September 2025 di Aula Kantor Desa Bandur Picak melalui tahapan survei, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kelembagaan. Tahap survei menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus LKD belum memahami secara komprehensif fungsi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, administrasi organisasi masih dilakukan secara konvensional dan belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga rendahnya kapasitas kelembagaan dalam mendukung tata kelola desa partisipatif.

Pada tahap penyuluhan, materi difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai sistem pemerintahan desa, kebijakan desa, serta peran strategis LKD sebagai mitra pemerintah desa. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebesar 71% berdasarkan perbandingan hasil pre-test dan post-test. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan partisipatif mampu meningkatkan kapasitas konseptual peserta dalam memahami fungsi kelembagaan desa. Temuan ini mendukung teori capacity building yang menegaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan prasyarat penting dalam menciptakan kelembagaan desa yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

a. Gambaran Lokasi Kegiatan

Desa Bandur Picak di Kabupaten Kampar, Riau, merupakan wilayah pedesaan yang kaya dengan potensi alam dan budaya. Kondisi geografis yang relatif mudah dijangkau dengan akses jalan darat menjadikan desa ini strategis untuk pelaksanaan program penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa

(LKD). Kehidupan sosial yang harmonis dan keterikatan warga dengan tradisi lokal menjadi modal penting dalam membangun kemitraan antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa, sehingga tercipta tata kelola desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

b. Mitra Kegiatan

Mitra kegiatan terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berperan saling melengkapi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Kabupaten Kampar. Pemdes sebagai lembaga formal memiliki kewenangan dalam mengatur, mengelola, dan melaksanakan program pembangunan desa, sekaligus memastikan kegiatan berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, LKD yang mencakup organisasi PKK, Karang Taruna, RT/RW.

c. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan Tanggal 10 September 2022 di Aula Kantor Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar dilakukan melalui tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah survei, di mana tim PKM melakukan kunjungan awal ke pemerintah desa untuk mengidentifikasi permasalahan LKD sehingga kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu dilanjutkan dengan sosialisasi, berupa diskusi internal tim PKM dan penyampaian informasi kepada Pemdes mengenai bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta solusi yang direkomendasikan. Tahap penyuluhan dilaksanakan oleh Tim PKM yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dengan materi tentang keberadaan pemerintah desa dalam sistem NKRI, kebijakan pemerintahan desa, serta kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintahan desa. Setelah pemaparan materi penyuluhan, selanjutnya dilakukan dialog tanya jawab dengan peserta, dapat dilihat gambar 6.



Gambar 6. Dialog antara Tim PKM dengan Pemdes dan LDK Bandur Picak Selanjutnya dilakukan kegiatan pelatihan, materi yang disampaikan

memperkuat pemahaman peserta tentang peran strategis Pemdes dan LKD dalam sistem pemerintahan desa, pelatihan administrasi surat menyurat

menggunakan *google doc*. Selanjutnya Tim PKM memberikan bantuan buku dengan Judul “Pemerintahan Desa di Indonesia” diharapkan buku ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah desa dan LKD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, dapat dilihat pada gambar 7 Berikut.



Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan PKM dan Penyerahan Bantuan Buku pada Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Untuk memastikan efektivitas, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap manfaat kegiatan bagi mitra. Tahap terakhir adalah keberlanjutan program, yang menilai keberhasilan PKM dalam meningkatkan profesionalitas LKD serta merancang tindak lanjut agar hasil kegiatan tetap berkesinambungan bagi tata kelola desa.

d. Target dan Keberhasilan Kegiatan

Untuk memastikan kegiatan PKM berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, Tim PKM menetapkan target yang ingin dicapai serta ukuran keberhasilan yang diharapkan. Target kegiatan yang telah ditetapkan dijelaskan pada tabel 2. sebagai berikut.

Tabel 2. Target dan Indikator Keberhasilan PKM

Aspek	Target Kegiatan	Keberhasilan Kegiatan
Identifikasi Permasalahan	Melakukan survei awal untuk mengetahui masalah	Permasalahan mitra teridentifikasi dengan

	mitra secara nyata	jelas dan menjadi dasar perencanaan kegiatan
Peningkatan Kapasitas	Memberikan pemahaman kepada Pemdes dan LKD tentang peran, fungsi, dan kedudukan mereka	Mitra memiliki pengetahuan dan keterampilan baru dalam memahami kebijakan dan kedudukan LKD
Solusi Praktis	Menyampaikan rekomendasi kegiatan melalui sosialisasi dan penyuluhan	Mitra memperoleh solusi yang relevan dan dapat diterapkan dalam tata kelola desa
Luaran Publikasi	Menghasilkan laporan kegiatan, artikel jurnal PKM, dan artikel media massa elektronik.	Tersedianya dokumen laporan resmi dan publikasi sebagai bukti nyata keberhasilan program.
Monitoring & Evaluasi	Menyusun mekanisme evaluasi untuk mengukur efektivitas kegiatan	Hasil evaluasi menunjukkan manfaat kegiatan bagi mitra, terutama peningkatan profesionalitas LKD
Keberlanjutan Program	Merancang tindak lanjut agar hasil kegiatan tetap berkesinambungan.	Terbentuknya komitmen keberlanjutan program untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa

e. Kendala Pelaksanaan

Tim PKM dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Tidak semua anggota LKD maupun masyarakat desa dapat hadir secara penuh dalam setiap tahapan, sehingga penyampaian informasi dan materi tidak merata.
2. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang pertemuan, perangkat teknologi, dan akses internet menjadi hambatan dalam mendukung efektivitas kegiatan.
3. Sebagian mitra masih memiliki pemahaman terbatas mengenai peran strategis LKD dalam tata kelola desa, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk proses adaptasi.

f. **Gambaran IPTEKS**



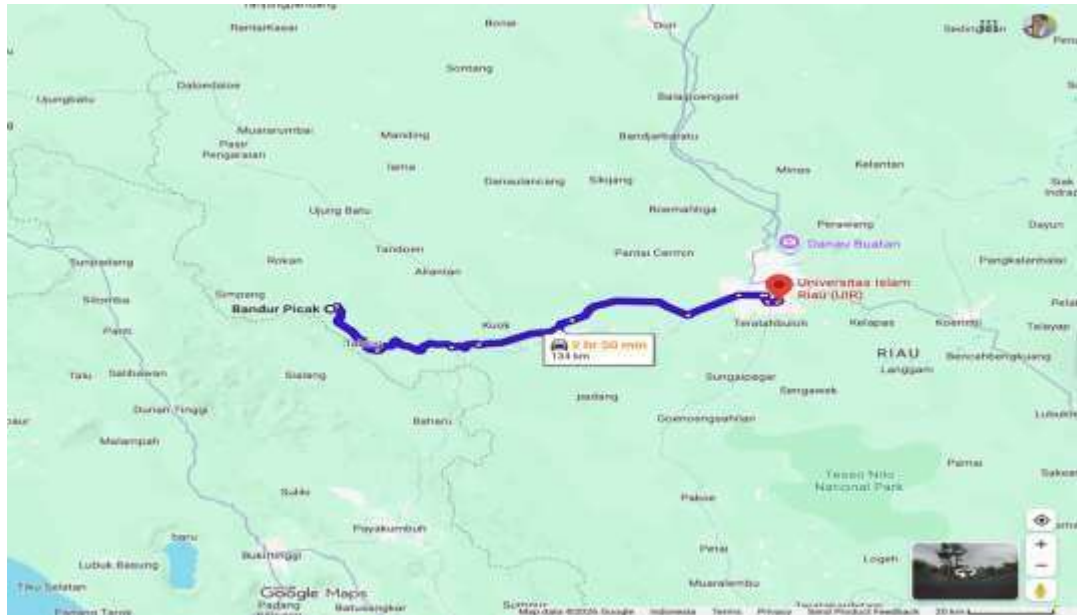
Gambar 8. Gambaran IPTEKS Penguatan Kapasitas LKD di Desa Bandur Picak, Kampar

g. **Rencana Tindak Lanjut**

Untuk memastikan keberlanjutan hasil kegiatan PKM, dirancang beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pendampingan berkelanjutan kepada LKD berupa pendampingan teknis secara berkala, terutama dalam penerapan hasil pelatihan dan penyuluhan
2. Pengembangan program lanjutan berupa workshop, atau simulasi kebijakan desa yang lebih mendalam, sesuai dengan kebutuhan mitra dan dinamika lokal.
3. Peningkatan kapasitas digital dorong Pemdes dan LKD memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem administrasi berbasis digital, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas tata kelola desa.

h. **Peta Lokasi Kegiatan**



Gambar 10. Peta Lokasi Desa Bandur Picak

i. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih Tim PKM ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau (UIR) yang telah mendukung dan membiayai kegiatan PKM tahun anggaran 2025.
2. DPPM UIR yang telah memfasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini.
4. Pemerintah Desa dan LKD Bandur Picak yang telah menjadi mitra dan turut serta aktif dalam setiap tahapan kegiatan.
5. Anggota Tim PKM yang telah bekerja keras dan berkomitmen tinggi untuk kesuksesan kegiatan PKM ini.

Simpulan

Kegiatan penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan berbasis participatory governance mampu meningkatkan kapasitas organisasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antara pemerintah desa dengan lembaga masyarakat. Hasil evaluasi memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi dan tata kelola LKD, serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam forum pembangunan desa setelah pelaksanaan program. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif pemerintah desa, tetapi juga oleh efektivitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

Kontribusi utama kegiatan ini terletak pada penerapan model penguatan LKD yang mengintegrasikan pendekatan capacity building, partisipasi masyarakat, dan digitalisasi administrasi desa. Model tersebut memberikan implikasi praktis bahwa penguatan kelembagaan desa akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendampingan partisipatif dan pengembangan kolaborasi lintas aktor secara berkelanjutan. Secara teoretis, hasil kegiatan memperkuat perspektif collaborative

governance yang menempatkan kelembagaan lokal sebagai aktor strategis dalam menciptakan tata kelola desa yang inklusif dan adaptif.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan pada durasi pendampingan yang relatif singkat serta belum optimalnya evaluasi dampak jangka panjang terhadap perubahan tata kelola kelembagaan desa. Oleh karena itu, penelitian dan program lanjutan perlu diarahkan pada pengembangan model evaluasi berbasis indikator pembangunan desa berkelanjutan, penguatan literasi digital kelembagaan desa, serta perluasan jejaring kolaborasi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan masyarakat guna menciptakan tata kelola desa yang lebih responsif, transparan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Afnan, D., Wijaya, M., Kartono, D. T., & Wibowo, A. (2025). Community empowerment model in the refuse-derived fuel waste management program in Indonesia. *Cleaner Waste Systems*, 12, 100364. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clwas.2025.100364>
- Andrews, R., Ferry, L., Skelcher, C., & Wegorowski, P. (2020). Corporatization in the public sector: Explaining the growth of local government companies. *Public Administration Review*, 80(3), 482–493. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.13052>
- Chapman, B. (2024). *The profession of government: the public service in Europe*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003487357>
- Eriksen, Andreas. (2020). Accountability and the Multidimensional Mandate. *Political Research Quarterly*, 74(2), 364–376. <https://doi.org/10.1177/1065912920906880>
- Hao, Y. (2023). Executive Branch and Autonomy of Nantou County and Township. In Y. Hao (Ed.), *Grassroots Governance in Taiwan* (pp. 15–48). Springer Nature Singapore. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-19-9829-4_2
- Humaedi, M. A., Wibowo, D. P., Hariyanto, W., Susilo, S. R. T., Wijayanti, F., Hakim, F. N., Martino, M., Wijaya, G., Andari, R. N., Yumantoko, Y., & Tessa, A. (2025). Shifting collective values: the role of rural women and gotong royong in village fund policy. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 411. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04577-6>, not only serve as a complement to the village apparatus, but also as key actors in inclusive, participatory, and sustainable village governance
- Kabadayi, S., O'Connor, G. E., & Tuzovic, S. (2020). Viewpoint: The impact of coronavirus on service ecosystems as service mega-disruptions. *Journal of Services Marketing*, 34(6), 809–817. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JSM-03-2020-0090>
- Maulidiah, S., Rauf, R., Manaf, H. A., & Khotami, K. (2023). Evaluation Of Simultaneous Village Head Elections In Kampar District, Riau Province In 2021. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 147–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v9i2.48887>

- Ng, M. K., & Wong, C. (2022). Spatial Planning for Smart Sustainable Development? *Planning Theory & Practice*, 23(5), 759–798. <https://doi.org/10.1080/14649357.2022.2139075>
- Nor, R., Gani, A. J. A., Saleh, C., & Amin, F. (2022). Organizational commitment and professionalism to determine public satisfaction through good governance, public service quality, and public empowerment. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 19(1), 191–217. <https://doi.org/10.1007/s12208-021-00297-0>, <https://doi.org/10.1007/s12208-021-00297-0>
- Ojiako, U., AlRaeesi, E. J. H., Chipulu, M., Marshall, A., & Bashir, H. (2024). Innovation readiness in public sector service delivery: an exploration. *Production Planning & Control*, 35(5), 437–460. <https://doi.org/10.1080/09537287.2022.2089266>
- Pangbourne, K., Mladenović, M. N., Stead, D., & Milakis, D. (2020). Questioning mobility as a service: Unanticipated implications for society and governance. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 131, 35–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.09.033>
- Pedersen, J. F., Egilstrød, B., Overgaard, C., & Petersen, K. S. (2022). Public involvement in the planning, development and implementation of community health services: A scoping review of public involvement methods. *Health & Social Care in the Community*, 30(3), 809–835. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/hsc.13528>
- Rauf, R., Othma, Z., Maulidiah, S., Yuslimi, N., Hayati, R., & Rahyunir, M. H. (2024). Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Membantu Tugas Pemerintahan Di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 421–433. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i2.53429>
- Remillard, E. T., Campbell, M. L., Koon, L. M., & Rogers, W. A. (2022). Transportation challenges for persons aging with mobility disability: Qualitative insights and policy implications. *Disability and Health Journal*, 15(1, Supplement), 101209. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2021.101209>
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2022). Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003198116>
- Seva, R. R., Gutierrez, A. N. A., Arante, H. R., Chua, A., Roque, M. A. C., & Sybingco, E. (2025). FloodCast: A user-centered flood monitoring system to enhance user engagement. *Progress in Disaster Science*, 28, 100492. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2025.100492>

